

## **POLA INTERAKSI SOSIAL DALAM MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA**

**Athoillah Islamy**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Jl. Kusuma Bangsa No.9, Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah – Indonesia 51141

Email: athoillahislamy@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Penelitian kualitatif dalam bentuk studi pustaka ini berorientasi untuk mengidentifikasi dimensi pola interaksi sosial dalam indikator moderasi beragama di Indonesia yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian normatif-filosofis ini menggunakan pola interaksi asosiatif dan disosiatif sebagai teori analisis. Hasil penelitian ini mengkonklusikan bahwa terdapat dimensi pola interaksi sosial yang bersifat asosiatif dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia. Pertama, pola interaksi kerja sama dalam indikator toleransi dan anti radikalisme. Pada konteks ini, dapat ditemukan dari pengarusutamaan moderasi beragama yang menekankan pada pembentukan paham maupun sikap sosial keberagamaan individu (kelompok) umat beragama yang moderat, yakni menghormati, menghargai, dan menerima realitas kemajemukan sosial serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, pola interaksi akomodasi dalam indikator komitmen kebangsaan dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Pada konteks ini, dapat ditemukan dari pengarusutamaan moderasi beragama yang menekankan pada pembentukan paham maupun sikap sosial keberagamaan individu (kelompok) umat beragama yang moderat dalam menjaga nasionalisme dan tradisi lokal yang baik selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pola interaksi asosiatif dalam membangun paham maupun sikap sosial keberagamaan umat yang moderat, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya, maupun bernegara. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji dimensi nilai-nilai sosial profetik agama-agama yang termuat dalam indikator moderasi beragama di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Pola interaksi sosial, indikator, moderasi beragama, Indonesia*

### **Abstract**

Qualitative research in the form of literature study is oriented to identify the dimensions of social interaction patterns in indicators of religious moderation in Indonesia formulated by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. This normative-philosophical research uses associative and dissociative interaction patterns as a theory of analysis. The results of this study conclude that there are dimensions of associative social interaction patterns in the four indicators of religious moderation in Indonesia. First, the interaction pattern of cooperation in indicators of tolerance and anti-radicalism. In this context, it can be found from the mainstreaming of religious moderation which emphasizes the formation of understanding and social attitudes of moderate religious individuals (groups), namely respecting, respecting, and accepting the reality of social plurality and upholding human values. Second, the pattern of accommodation interaction in indicators of national commitment and accommodating to local wisdom. In this context, it can be found from the mainstreaming of religious moderation which emphasizes the formation of understanding and social attitudes of moderate religious individuals (groups) in maintaining nationalism and good local traditions as long as they do not conflict with religious teachings. The theoretical implications of this study show that associative interaction patterns are needed in building understanding and social attitudes of moderate religious diversity, both in social, cultural, and religious life. The limitations of this research has not examined the dimensions of the prophetic social values of religions contained in the indicators of religious moderation in Indonesia.

**Keywords :** *Social interaction patterns, indicators, religious moderation, Indonesia*

## **Pendahuluan**

Pengarustamaan moderasi beragama pada ranah implementasinya akan selalu berkontestasi dengan pelbagai nilai yang ada. Atas dasar inilah, maka untuk melakukan upaya identifikasi terhadap karakter keberagamaan individu (kelompok) harus dapat mengilustrasikan seperti apa kontestasi maupun pergumulan nilai tersebut terjadi. Sebab, paham maupun sikap keberagamaan individu pada ranah praksisnya dilandasi oleh 2 hal fundamental, yakni akal dan wahyu. Keberpihakan berlebih terhadap potensi akal akan dapat dinilai sebagai kelompok ekstrem kiri, bahkan juga dapat memicu munculnya sikap mereka yang cenderung akan mengabaikan keberadaan teks-teks teologis. Sebaliknya, pemahaman yang sangat tekstualis terhadap teks-teks teologis dalam ajaran agama juga dapat berimplikasi pada bentuk paham maupun sikap keberagamaan yang konservatif. Oleh karena itu, seorang individu (kelompok) umat beragama yang moderat akan berusaha untuk dapat melakukan kompromi terhadap kedua kecenderungan tersebut. Maksudnya, yakni ia dapat bergerak ke kiri untuk menggunakan potensinya, akan tetapi juga dapat berusaha untuk ke kanan agar tetap berlandaskan pada teks, namun tetap dibarengi oleh pemahaman terhadap konteks yang ada di sekelilingnya (Saihu & Islamy, 2022 :25).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka sudah semestinya pengarustamaan moderasi beragama bagi masyarakat Indonesia membutuhkan kerja sama dan peran aktif oleh patra tokoh agama, seluruh elemen masyarakat, terlebih pihak pemerintah. Sebab, upaya penanaman sekaligus pembentukan karakter keberagamaan individu (kelompok) yang moderat pada ranah praksisnya merupakan persoalan yang tidak mudah, melainkan diperlukan usaha massif bersama masyarakat maupun pemerintah melalui beragam strategi dalam suksesi pengarusutamaan moderasi beragama bagi umat beragama di Indonesia (Islamy, 2022a :21). Terlepas upaya tersebut pada ranah praksisnya berpotensi menuai respon pro-kontra di tengah kehidupan umat beragama di Indonesia.

Pernyataan di atas tidaklah berlebihan. Sebab, pada ranah praksisnya, tidak sedikit dijumpai prasangka maupun penilaian buruk oleh sebagian individu atau kelompok umat beragama di Indonesia yang memandang moderasi beragama sebagai upaya liberalisasi ajaran agama dalam konteks kehidupan bernegara (Siswanto & Islamy, 2022 :199). Respons negatif tersebut menjadi hal yang sangat disayangkan. Sebab, empat indikator moderasi beragama meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-radikalisme, dan akomodatif terhadap kearifan lokal yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dapat mewujudkan interaksi sosial harmoni bagi umat beragama

di Indonesia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya, maupun bernegara (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019:43).

Adapun eksistensi 4 indikator moderasi beragama di Indonesia sebagaimana di atas sejatinya dapat mengantarkan terbentuknya pola interaksi sosial yang dapat mewujudkan kehidupan sosial umat beragama yang moderat, inklusif dan terbuka terhadap realitas kehidupan sosial umat beragama. Terlebih di tengah fakta kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia (Azis et al., 2021: 231). Dengan kata lain, jika dipahami lebih mendalam terdapat dimensi pola interaksi sosial yang bersifat produktif terhadap pembentukan kehidupan umat beragama yang moderat di Indonesia. Oleh karena itu, sangat disayangkan ketika ragam indikator moderasi beragama tersebut tidak dipahami dengan baik terkait muatan pola interaksi sosial yang dapat ditemukan di dalamnya.

Mangacu pada uraian di atas, penelitian ini memiliki tujuan guna melakukan identifikasi terhadap dimensi pola interaksi sosial dalam indikator moderasi beragama di Indonesia. Terdapat ragam penelitian yang korelatif dengan pembahasan utama penelitian ini. antara lain, Edi Junaedi mengatakan kehadiran buku moderasi beragama yang diterbitkan Kemenag RI memiliki ragam maksud antara lain dalam rangka menjawab kesalahpahaman publik atas tujuan dari pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia (Junaedi, 2019: 395–396). Berikutnya, Tahtimatur Rizkiyah dan Nurul Istiani mengatakan indikator moderasi beragama di Indonesia memiliki titik temu terhadap berbagai nilai pendidikan sosial profetik Islam (Rizkiyah & Istiani, 2021: 86). Kesimpulan demikian juga dikuatkan oleh penelitian Wahyudin dkk dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat dimensi ragam nilai sosial keberagamaan Islam pada indikator moderasi beragama di Indonesia (Wahyudin et al., 2021: 274). Kemudian Donny Khoirul Azis dkk dalam penelitiannya menuturkan bahwa indikator moderasi beragama di Indonesia sesuai dengan ragam nilai Pancasila (Azis et al., 2021: 230), Selanjutnya, Athoillah Islamy menjelaskan terdapat beragam nilai pendidikan Islam multikultural pada indikator moderasi beragama di Indonesia (Islamy, 2022b:48).

Berbeda dari ragam penelitian terdahulu di atas, penelitian ini fokus untuk mealkuakann identiifikasi terhadap dimensi pola interaksi sosial pada indikator moderasi beragama di Indonesia. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi aspek perbedaan dan juga kebaruan dari penelitian ini. Penelitian ini urgen dilakukan disebabkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi *counter* atas stigma buruk oleh sebagian umat beragama di Indonesia yang menganggap pengarusutamaan moderasi beragama sebagai bentuk

liberalisasi atau sekulerisasi agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya, maupun bernegara.

## **Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif dalam bentuk studi pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Data utama berupa uraian indikator tentang indikator moderasi beragama di Indonesia yang dirumuskan Kemenag RI pada buku berjudul *Moderasi Beragama*. Data sekunder menggunakan berbagai karya ilmiah yang korelatif terhadap pembahasan inti. Pola interaksi sosial (asosiatif dan disosiatif) menjadi teori analisis dalam pembahasan inti, yakni digunakan untuk mengidentifikasi dimensi bentuk pola interaksi sosial pada empat indikator moderasi beragama di Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Sementara itu, analisa melalui teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pola Interaksi dalam Kehidupan Sosial**

Realitas kehidupan sosial akan senantiasa dipertemukan pada beragam aspek kemajemukan dalam kehidupan sosial yang ada. Pada satu sisi, kemajemukan tersebut dapat berdampak positif bagi kehidupan sosial untuk saling melengkapi. Namun di sisi lain, tidak sedikit justru memicu munculnya konflik interaksi sosial. Untuk menyelesaikan problem atau potensi konflik yang dapat terjadi tersebut dibutuhkan upaya strategis yang dapat mempertemukan -aspek distingtif dalam rangka mencapai bentuk relasi interaksi sosial yang harmoni. Pada konteks inilah, sikap harmoni antar kehidupan sosial dapat direalisasikan melalui manifestasi pluralisme dalam kemajemukan sosial budaya maupun agama (Makatitaet al., 2022: 60)

Adapun relasi kehidupan sosial antar manusia, baik antar individu atau antar kelompok maupun antara individu dengan kelompok meniscayakan pola interaksi sosial yang beragam. Dengan kata lain, sudah pastinya terdapat beragam bentuk interaksi sosial yang dapat terjadi atau menjembatani relasi kehidupan sosial mereka dengan beragam kepentingan masing-masing yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, setidaknya terdapat dua bentuk pola interaksi sosial pada umumnya, yakni pola interaksi asosiatif dan pola interaksi disosiatif. Masing-masing pola tersebut dalam implementasinya juga memiliki strategi masing-masing. Uraian lebih lanjut, sebagai berikut.

## 1. Pola Asosiatif

Adapun keberadaan pola asosiatif dalam ranah praksis kehidupan interaksi sosial akan dapat mengantarkan manusia pada orientasi terwujudnya bentuk integrasi sosial. Upaya untuk mencapai orientasi tersebut, maka pada ranah aplikasi pola interaksi asosiatif tersebut dapat dilakukan dengan beragam strategi, sebagai berikut.

Pertama, kerja sama. Strategi ini memungkinkan bisa terlaksana pada saat kondisi masyarakat dapat menyadari keberadaannya mempunyai kepentingan yang sama, sehingga mereka dapat bersepakat untuk merealisasikan adanya bentuk kerjasama guna mencapai tujuan atau kepentingan bersama tersebut. Hal ini dapat dilalui melali beragam bentuk kerja sama, seperti tawar-menawar, kooptasi, koalisi dan patungan. Kedua, akomodasi. Strategi ini menjadi bentuk usaha penyesuaian antar individu atau antara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dalam rangka untuk meminimalisir, mencegah maupun menanggulangi adanya ketegangan maupun kekacauan. Proses akomodasi dibagi dalam beberapa bentuk antara lain. (a) *Coercion*, yakni akomodasi yang prosesnya ada bentuk paksaan. (b) Kompromi, yakni akomodasi yang menekankan setiap pihak yang terlibat guna mengurangi permintaannya. Hal demikian diorientasikan agar tercapai suatu penyelesaian atas terjadinya konflik. (c) Mediasi, yakni usaha untuk menanggulangi konflik melalui langkah meminta bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral. (d) Arbitrasi, yakni usaha untuk mencapai bentuk kompromi dengan meminta bantuan pada pihak ketiga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lembaga yang posisinya lebih dari para pihak yang sedang berkonflik (e) Peradilan, yakni usaha untuk menyelesaikan konflik dengan jalur pengadilan. (f) *Stalemate*, yakni setiap pihak yang sedang terjadi konflik memiliki kekuatan setara dan akan berusaha berhenti melakukan konflik tersebut dikarenakan mereka masing-masing sudah tidak memungkinkan lagi untuk maju atau mundur. (g) Toleransi, yakni bentuk akomodasi yang direalisasikan tanpa melalui persetujuan secara formal. (h) Konsiliasi, yakni usaha untuk mempertemukan berbagai kepentingan dari para pihak yang berselisih dalam rangka mencapai konsesu bersama. Ketiga, asimilasi, yakni usaha untuk meminimalisir berbagai segi distingsi yang terdapat pada beberapa individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat agar terjadi persamaan sikap, mental, dan perbuatan guna tercapainya kepentingan bersama. Keempat, akulturasi. Strategi ini dapat diimplementasikan saat kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan ragam unsur dari suatu kebudayaan lain. Kemudian dalam perjalanan waktu, unsur kultur asing tersebut menjadi dapat respons positif dalam

kebudayaan sendiri dengan tidak menghilangkan karakter kepribadian dari realitas budaya yang telah ada.

## **2. Pola Disosiatif**

Berbeda dengan pola interaksi asosiatif sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, keberadaan pola disosiatif dalam relasi interaksi sosial manusia dapat mengantarkan pada orientasi terjadinya bentuk perpecahan maupun pemisahan. Keberadaan pola disosiatif ini pada ranah praksisnya dapat ditemukan pada 3 model strategi interaksi sosial. Pertama, kompetisi, yakni upaya individu seseorang atau kelompok sosial dalam memperoleh sebuah kemenangan atau hasil yang dilakukan secara kompetitif. Kedua, kontravensi, yakni bentuk persaingan dan pertentangan (konflik). Ketiga, konflik, yakni proses interaksi sosial antar individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk gap atau pertikaian yang dipicu oleh perbedaan paham maupun kepentingan fundamental.

Adapun faktor yang dapat melahirkan terjadinya sebuah konflik dalam interaksi sosial, antara lain. Pertama, etnosentrisme. Keberadaan faktor ini dalam bentuk penilaian yang memposisikan kelompok sendiri sebagai sentral segalanya. Sedangkan kelompok lain akan senantiasa dikomparasikan dan didudukan dengan standar kelompok yang diikuti. Kedua, stereotip. Faktor ini dalam bentuk keyakinan yang menggenalir, merendahkan, atau melebih-lebihkan terhadap keberadaan etnis kelompok tertentu. Keberadaan stereotip ini dalam praktiknya dapat memicu terjadinya bentuk identifikasi individu pada basis anggota kelompok tertentu dan juga menilai diri individu tersebut. Kedua, prasangka. Faktor ini berupa resistensi pada segala bukti yang dapat berpotensi menggeser eksistensinya, sehingga menimbulkan pikiran negatif pada individu atau kelompok lain yang tidak sesuai dengan dirinya (Hariyanto & Islamy, 2022: 205-206)

Pola interaksi asosiatif dan disosiatif yang telah dijabarkan panjang lebar di atas akan menjadi teori analisis dalam mengidentifikasi keberadaan dimensi pola interaksi sosial pada empat indikator moderasi beragama yang menjadi objek pembahasan inti penelitian ini.

## **Potret Kehidupan Masyarakat Multikultural di Indonesia**

Tingginya tingkat pluralitas budaya lokal di tengah kehidupan masyarakat Indonesia menghendaki pentingnya semangat perwujudan paham dan sikap moderat dalam kehidupan sosial umat beragama. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan, karena kemajemukan kultural jika tidak disikapi dan dikelola dengan baik, maka dapat mengantarkan terjadinya bentuk konflik sosial atau agama. Namun untuk mewujudkan hal

tersebut tidaklah mudah, melainkan dibutuhkan kesadaran epistemologis masyarakat Indonesia apapun agamanya untuk dapat bersikap moderat dalam mendudukan relasi agama dan budaya agar tidak harus dibenturkan, baik pada wilayah teoritis maupun praktis. Pada konteks inilah, pengarustamaan nilai-nilai moderasi beragama menjadi sebuah keharusan yang tidak boleh terabaikan (Islamy & Makatita, 2022: 78)

Penting diketahui dan disadari bahwa kurang lebih terdapat sekitar 250 suku, 250 suku bahasa lokal, 13.000 pulau dan 5 agama di tenagh kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan fakta keragaman tersebutl, maka menjadi hal yang lumrah jika Indonesia dikategorikan sebagai negara multikultural. Bahkan fakta multikultural tersebut juga memunculkan slogan khas persatuan masyarakat Indonesia yang berbunyi *Bhineka Tunggal Ika* yang maksudnya, meskipun terdapat keragaman, namun keberadaanya tetap satu jua. Keberadaan slogan tersebut menegaskan pada kita bahwa menjadi hal yang sangat urgen kesadaran paham maupun sikap guna merawat kesatuan, kerukunan, keharmonisan kondisi keragaman dalam realitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Meski demikian, untuk merealisasikan semangat multikulturalisme dalam bingkai kemajemukan masyarakat Indonesia, bukanlah persoalan yang mudah. Padahal pada konteks pluralitas kehidupan sosial, semangat multikulturalisme menjadi sebuah keniscayaan dan sangat urgen dalam rangka menjaga serta merawat keharmonisan dalam keragaman kehidupan sosial. Hal demikian dikarenakan manifestasi dari semangat multikulturalisme pada rnah praktisnya akan mengantarkan individu dapat memiliki kesadaran sikap untuk saling menghargai, menghormati. Tidak hanya itu, bahkan dapat saling kerja sama di tengah ragam aspek perbedaan kehidupan yang ada

Sebagai langkah konkrit dalam upaya menanamkan nilai atau semangat multikulturalis, yakni dengan terselelnggaranya aktifitas pendidikan multikultural. Lebih lanjut, penting untuk diketahui bahwa pendidikan multikultural menjadi bagian langkah strategis guna membangun karakter kepribadian individu yang toleran pada fakta keragaman kehidupan sosial, baik dalam konteks kehidupan beragama, bermasyarakat, berbudaya, maupun bernegara (berpolitik), seperti halnya pada kehidupan sosial masyarakat multikultural di Indonesia. Manifestasi paham maupun sikap multikultural tersebut juga memiliki orientasi untuk menghindarkan dari terjadinya problem interaksi sosial yang berpotensi memicu disintegrasi nasional. Pernyataanini tidak berlebihan. Sebab dalam paradigma interrelasi pada kehidupan masyarakat multietnis akan menekankan pada 3 (tiga) kemampuan, antara lain kemampuan kultural, sosial, dan personal. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemampuan kultural, yakni pengetahuan yang dapat menjadikan

individu (kelompok) agar bersedia untuk terlibat pada aktifitas sosial. Sementara itu, kemampuan sosial, yakni ragam kemampuan individu (kelompok) agar bersedia terlibat dalam relasi solidaritas. Selanjutnya, Kemampuan kepribadian, yakni kesediaan individu (kelompok) untuk dapat berdialog dan berpartisipasi agar merawat identitas jati diri pada perubahan kehidupan sosial yang ada.

Urgensi atas penanaman ragam nilai maupun semangat multikulturalisme pada kehidupan masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat diperlukan. Sebab, multikulturalisme menjadi sebuah ideologi yang dipandang dapat menjadi solusi dalam memecahkan atas persoalan sosial yang dipicu oleh ragam distingsi sosial yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam relasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, adanya kesadaran paham maupun sikap bersama dalam kemajemukan dapat menjadi dasar segala bentuk pengambilan konklusi politik dan beragama persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan kolektif (Islamy, 2022b:51-52).

Mengacu dari uraian di atas dapat dikonklusikan bahwa fakta keragaman pada kehidupan sosial masyarakat multikultural menghendaki pentingnya paham maupun sikap sosial masyarakat yang mencerminkan semangat multikulturalisme, baik dalam konteks keragaman kehidupan bermasyarakat, berbudaya, berpolitik maupun beragama. Pada konteks inilah, fakta multikultural dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadi bagian penting dan fundamental dalam menyadarkan umat bergama di Indonesia agar dapat memiliki paham maupun sikap sosial keberagamaan yang moderat terhadap fakta kemajemukannya sosial.

### **Eksistensi Moderasi Beragama di Indonesia**

Usaha dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia memang bukanlah persoalan yang mudah. Hal demikian dikarenakan selain harus terintegrasi pada sistem perencanaan pembangunan Indonesia dalam jangka panjang. Namun secara substantif, fakta moderasi beragama dalam kehidupan interaksi sosial umat beragama sesungguhnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Sebab, realitas masyarakat Indonesia mempunyai modal sosial dan kultural yang telah mengakar kuat. Berbagai budaya luhur dalam kehidupan interaksi sosial tersebut telah menjadi fondasi sekaligus filosofi masyarakat Indonesia (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019:v-vi).

Sebelum jauh memahami mengapa pentingnya bentuk peangarusutamaan moderasi beragama pada konteks kehidupan di Indonesia, urgen untuk kita pahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud moderasi beragama. Penting diketahui bahwa kata moderasi secara etimologi merupakan kata yang berakar dari kata moderat. Kata moderat di sini

berkedudukan sebagai kata sifat dari kata *moderation*, yang menunjukkan arti tidak berlebihan, sedang (tengah-tengah). Sementara itu, pada konteks bahasa Indonesia, kata tersebut diadopsi menjadi kata moderasi yang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai bentuk usaha untuk meminimalisir adanya bentuk kekerasan, atau menghindari bentuk keekstriman. Atas dasar inilah, maka kata moderasi ketika dipadukan dengan kata beragama (moderasi beragama), akan menunjukkan maksud sebagai paham maupun sikap yang meminimlisir maupun mencegah terjadinya kekerasan atau keekstreman dalam praktik kehidupan keberagamaan.

Adapun pada konteks Indonesia secara khusus, yakni sebagai negara majemuk dan menerapkan sistem demokrasi, maka menjadi sebuah keniscayaan jika terdapat ragam perbedaan pandangan, ideologi, maupun kepentingan yang terjadi dalam kehidupan sosial politik, budaya, tidak terkecuali juga dalam paham maupun sikap sosial keberagamaan. Oleh sebab itu, urgensi serta aplikasi pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia perlu dilakukan secara kontekstual, tidak tekstual. Maksudnya, manifestasi pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia butuh upaya penekanan atas pentingnya kesadaran, pemahaman dalam kehidupan sosial keberagamaan yang moderat, inklusif, terbuka terhdap realitas fakta keragaman yang ada, baik dalam kehidupan beragama, berbudaya, maupun bernegara. Hal ini dikarekana masyarakat Indonesia mempunyai keragaman kultur, budaya serta kearifan lokal. Oleh sebab itu, pengarusutamaan moderasi beragama diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap problematika kehidupan umat beragama sekaligus peradaban umat manusia, baik dalam sekala masyarakat nasional maupun global. Sebab, paham maupun sikap keberaamaan yang moderat dapat mengantarkan individu (kelompok) umat beragama menghindarkan ragam aksi radikalisme, ekstrimisme, terorisme maupun anarkisme atas nama agama (Fahri and Zainuri, 2019: 95).

Berdasarkan fakta kemajemukan masyarakat Indonesia sebagaimana uraian di atas, maka keberadaan paham maupun sikap sosial keberagamaan yang eksklusif dapat menimbulkan akar konflik atau disintegrasi sosial dalam interaksi kehidupan antar umat beragama. Sebab, banyaknya konflik bernuansa keagamaan yang terjadi di Indonesia pada umumnya dipicu oleh eksklusifisme paham maupun sikap sosial keberagamaan. Upaya prefentif atas terjadinya disintegrasi dalam interaksi sosial antar umat beragama tersebut diperlukan paham maupun sikap sosial umat beragama yang moderat, yakni inklusif atau terbuka. Pada konteks ini, urgensi untuk dipahami kembali bahwa kata moderasi memuat arti moderat, yakni lawan dari ekstrem kiri maupun kanan dalam merespons pluralitas kehidupan sosial umat beragama. Oleh sebab itu, pengarusutamaan moderasi beragama di

Indonesia akan dapat mengantarkan pentingnya sikap toleransi, saling menghargai, dan menghormati terhadap pluralitas kehidupan sosial..

Selain di atas, pengarusutamaan moderasi beragama pada ranah praksis pemahaman terhadap ajaran agama juga dapat mengantarkan pada individu (kelompok) untuk dapat memahami teks-teks ajaran agama secara moderat, yakni tidak terjebak pada pemahaman ekstrem, seperti halnya fenomena umat beragama di tengah kehidupan masyarakat yang mudah dijumpai, terdapat dua kelompok ekstrem. Satu kelompok yang memiliki kecenderungan yang memprioritaskan teks, dan mengabaikan akal manusia dengan baik untuk memahaminya. Hal demikian seringkali menyebabkan teks-teks normatif ajaran agama dipahami serta diimplementasikan dengan mengabaikan latar konteks yang menyertainya. Sebaliknya, pada kelompok ekstrem lainnya yang sering diberi predikat sebagai kelompok liberal, yakni mereka terlalu memposisikan potensi akal manusia dan cenderung mengabaikan tekstualitas normatif ajaran agama. Pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia harus dipahami sebagai bentuk konsesus bersama dalam rangka merealisasikan terwujudnya kemampuan individu (kelompok) umat beragama untuk mengelola dan mengatasi aspek pluralitas di tengah kehidupan sosial beragama, bermasyarakat maupun bernegara (Akhmadi, 2019: 49–50). Sebagai contoh sederhananya, sikap moderasi beragama pada konteks pluralitas kehidupan umat beragama di Indonesia, yakni menghindari klaim mayoritas yang dilabelkan terhadap individu (kelompok) agama dengan jumlah penganut terbanyak. Sebaliknya, juga tidak perlu adanya klaim minoritas yang dilabelkan pada individu (kelompok) agama dengan jumlah sedikit (Islamy, 2021c:217).

Mengacu pada pemaparan di atas dapat dikonklusikan bahwa pengarusutamaan moderasi beragama melalui paham maupun sikap sosial keberagamaan yang moderat, toleran, inklusif dan terbuka menjadi hal yang urgen untuk diimplementasikan dalam realitas keragaman sosial kehidupan beragama, berbudaya, bahkan berpolitik di Indonesia.

#### **Dimensi Pola Interaksi Asosiatif dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia.**

Fenomena aksi radikalisme, anarkisme maupun terorisme bernuansa agama di Indonesia masih belum usai dan menjadi problem akut bagi keamanan nasional. Fenomena tersebutlah yang kemudian menjadi perhatian serius masyarakat, terlebih pemerintah Indonesia guna menanggulangnya melalui beragama cara. Sebagai contoh, Kementerian Kemenag RI pada tahun 2019 merumuskan 4 indikator moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Keberadaan ragam indikator tersebut pada ranah praksisnya dapat menjadi pendekatan

untuk mengidentifikasi sekaligus merealisasikan paham maupun sikap sosial keberagamaan individu (kelompok) yang moderat di Indonesia.

Prasangka negatif yang berkembang di tengah umat beragama di Indonesia, yakni pengarusutamaan moderasi beragama sebagai usaha liberalisasi agama yang pada ranah praksisnya dapat menjadikan agama menjauh dari ajaran agamanya. Kesalah pahaman demikian pada akhirnya berimplikasi pada stigma buruk publik yang memandang terhadap moderasi beragama tersebut yakni timbulnya sikap antipati masyarakat yang cenderung tidak menerima bahkan resistan segala bentuk pengarusutamaan nilai-nilai moderasi beragama.

Implementasi moderasi beragama sesungguhnya mengarah pada wujud paham maupun sikap keberagamaan individu (kelompok) umat beragama yang seimbang. Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini sebagai bentuk prinsip jalan tengah pada praktik keberagamaan yang dapat menjauhkan dari perwujudan paham maupun sikap berlebihan, yakni baik ekstrem kiri maupun kanan. Oleh karena itu, pengarusutamaan moderasi beragama pada konteks kehidupan umat beragama di Indonesia juga dapat menjadi kunci terbangunnya toleransi dan kerukunan dalam keragaman kehidupan sosial. Atas dasar inilah, pada konteks kehidupan masyarakat yang plural seperti Indonesia, keberadaan moderasi beragama menjadi keniscayaan yang urgen untuk direalisasikan (Islamy, 2022d:21).

Berdasarkan analisis penulis terhadap data inti penelitian menunjukkan bahwa terdapat dimensi pola interaksi sosial bersifat asosiatif yang termuat pada empat indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kemenag RI. Uraian penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

### **1. Pola Kerja Sama dalam Indikator Toleransi dan Anti Radikalisme**

Keberadaan toleransi sebagai salah satu indikator pada konteks pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia menekankan pentingnya membangun paham maupun sikap sosial keberagamaan individu (kelompok) untuk dapat saling menghormati, menghargai, dan menerima realitas keragaman dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbudaya maupun bernegara di Indonesia. Oleh sebab itu, manifestasi paham maupun sikap toleransi menjadi salah satu indikator yang fundamental dan urgen dalam mewujudkan tatanan kehidupan umat beragama, baik individu maupun kelompok di Indonesia yang moderat dan sejalan dengan sistem demokrasi yang ada. Hal ini disebabkan sistem politik demokrasi yang diimplementasikan akan dapat mudah terwujud jika kondisi masyarakatnya dapat senantiasa menjunjung tinggi nilai toleransi dalam keragaman

kehidupan sosial yang ada (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019:44). Pentingnya toleransi dalam konteks kehidupan di Indonesia tidak dapat ditawar. Mengingat toleransi merupakan elemen yang penting dalam terwujudnya kehidupan demokrasi di negara yang majemuk. Sebab sistem demokrasi hanya dapat terwujud ketika setia warga negara memiliki kesadaran untuk menghargai dan menghargai perbedaan antar individu (Husaini & Islamy, 2022:66-67).

Adapun dalam relasi kehidupan antar umat beragama, manifestasi nilai toleransi menjadi indikator urgen untuk membangun intensitas hubungan harmoni dan saling kooperatif dalam ragam persoalan kehidupan sosial maupun politik. Orientasi tersebut dapat diimplementasikan melalui pembentukan paham maupun sikap sosial keberagamaan yang mernjunjung toleransi antar umat beragama. Begitu juga, terkait relasi seagama, keberadaan wujud toleransi juga diharapkan dapat melahirkan paham maupun sikap sosial yang moderat dan bijak dalam menghadapi berbagai macam sekte minoritas yang dipandang telah melakukan deviasi dari mayoritas kelompok agama tertentu tersebut (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 45) Sikap toleransi ini semakin menjadi indikator moderasi beragama yang urgen untuk diaplikasikan di tengah relasi kehidupan umat beragama di Indonesia. Terlebih ragam konflik umat beragama di pelbagai daerah Indonesia juga seringkali terjadi antar aliran atau antar aliran dalam sebuah agama tertentu (Yenuri et al., 2021: 142).

Berikutnya, anti radikalisme dalam konteks moderasi beragama di Indonesia dipahami sebagai ideologi, paham, sikap maupun gerakan yang bermaksud untuk mengganti tatanan sistem kehidupan sosial dan politik di Indonesia yang telah menjadi konsensus bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Upaya untuk mengganti tersebut diejawantahkan dengan segala bentuk kekerasan atas nama agama. Radikalisme atas nama agama ini pada ranah praktisnya seringkali identik dengan pelbagai aksi terorisme oleh individu (kelompok) umat beragama yang memiliki paham radikal. Dalam melancarkan aksinya, mereka seringkali melakukan segala cara demi mencapai orientasinya kendatipun harus dengan langkah melakukan kekerasan fisik, bahkan meneror para pihak yang dianggapnya bertentangan dengan mereka. Pada konteks ini, juga penting diketahui dan disadari bahwa bahwa radikalisme atas nama agama dapat terjadi pada setiap individu yang menganut agama apapun, tidak hanya terjadi pada agama tertentu saja (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 45-46).

Usaha pemerintah Indonesia guna memberangus ragam aksi radikalisme maupun terorisme yang berlindung dibalik atas nama agama senantiasa dilakukan dengan beragam

strategi. Namun fakta empiris memperlihatkan bahwa aksi radikalisme maupun terorisme atas nama agama tersebut masih seringkali terjadi di pelbagai daerah Indonesia. Terlepas dari itu, urgen untuk disadari kembali bahwa aksi mereka tersebut tidak terlepas dari ragam manifestasi paradigma (keyakinan) keberagamaan yang memicunya. Dengan kata lain, aksi mereka tersebut tidak hal yang kebetulan, akan tetapi bersumber dari landasan paradigma dan motif yang menggerakannya (Hidayati et al., 2021: 10).

Meski tidak dapat dibantah bahwa ragam fenomena aksi radikalisme atas nama agama merupakan bentuk tindakan yang menyimpang. Jika dilihat dalam sudut pandang psikologi agama, maka dapat dijelaskan bahwa setidaknya ada 2 bentuk orientasi keagamaan yang dapat menjadi motif untuk bertindak. Pertama, orientasi intrinsik agama, yakni ajaran agama dijadikan sebagai motif atau orientasi tindakan. Kedua, orientasi ekstrinsik agama, yakni ajaran agama dijadikan alat legitimasi dalam mendapatkan orientasi subjektif. Dengan kata lain, radikalisme atas nama Islam sesungguhnya mempunyai beragam motif yang melandasinya. Menyikap ragam motif radikalisme atas nama agama tersebut diperlukan ragam upaya massif, baik dari elemen masyarakat sipil maupun pemerintah dengan beragam bentuk program maupun media, terlebih dengan desiminasi nilai ajaran agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan (Husaini & Islamy, 2022:62).

Jika ditinjau dalam pola interaksi sosial, maka eksistensi indikator toleransi dan anti radikalisme pada konteks pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan pola interaksi asosiatif berupa bentuk kerja sama dalam membangun terwujudnya kehidupan sosial umat beragama yang moderat dan harmoni di tengah kemajemukan kehidupan sosial di Indonesia. Sebab, untuk membangun kehidupan harmoni di tengah perbedaan segala aspek kehidupan dibutuhkan peran kerjama yang dilandasai dengan nilai toleransi.

Begitu juga terkait indikator anti radikalisme dalam moderasi beragama juga dapat dikatakan sejalan dengan pola interaksi asosiatif berupa kerja sama. Hal demikian disebabkan manifestasai anti radikalisme dalam pengarusutamaan moderasi beragama akan mengantarkan pada individu (kelompok) umat beragama di Indonesia agar dapat berkerja sama dalam rangka meminimalisir maupun mencegah terjadinya paham segala paham, sikap maupun gerakan untuk melanggar konstitusi negara dengan cara melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Pada konteks inilah, maka kesadaran untuk bekerja sama dalam membangun relasi kehidupan umat beragama yang moderat, inklusif, terbuka terhadap

norma negara dalam mewujudkan relasi harmoni di tengah kemajemukan antar umat bergama.

Dengan ditemukannya keberadaan dimensi pola interaksi asosiatif berupa kerja sama, baik dalam indikator toleransi maupun anti rasdikalisme sebagaimana telah dipaparkan di atas, menunjukkan pada kita bahwa suksesti pengarustamaan moderasi beragama di Indonesia oleh Kemenag RI menekankan pentingnya impelemntasi interaksi sosial yang bersifat asosiatif berupa kerja sama dalam membangun paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam realitas keragaman kehidupan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.

## **2. Pola Akomodasi dalam Indikator Komitmen Kebangsaan dan Akomodatif Terhadap Kearifan Lokal**

Ragam bentuk usaha dalam rangka pembentukan sekaligus penguatan kepribadian bangsa di tengah arus globalisasi modern saat ini menjadi hal yang urgen dan memerlukan berbagai strategi serius, baik oleh masyarakat sipil maupun pemerintah. Sebab, hilangnya karakter jati diri sebuah bangsa dapat memicu terjadi hilangnya semangat nasionalisme maupun patriotisme persatuan, sehingga dapat menimbulkan terjadinya beragam konflik sosial. Pada konteks inilah, strategi penanaman jiwa nasionalis dan pluralis bagi masyarakat Indonesia menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam merespons beragam implikasi di tengah era globalisasi (Husaini & Islamy, 2022:64).

Argumen epistemologis, mengapa komitmen kebangsaan penting menjadi bagian indikator dalam mewujudkan kehidupan keberagamaan yang moderat. Hal demikian dikarenakan pada tinjaun perspektif moderasi beragama dijelaskan, bahwa usah untuk mengaplikasikan ajaran agama seperti halnya mengaplikasika kewajiban sebagai warga negara. Maksudnya, individu (kelompok) umat beragama yang melaksanakan kewajiban sebagai warga negara menjadi bagian dari wujud aplikasi ajaran agama (Islamy & Makatita, 2022 :77). Oleh sebab itu, sudah menjadi hal niscaya jika manifestasi komitmen kebangsaan menjadi salah satu indikator dalam pengarustamaan moderasi beragama di Indonesia. Keberadaan indikator komitmen kebangsaan dalam indikator moderasi beragama menjadi hal yang urgen dan dapat menjadi sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi paham maupun sikap sosial keberagamaan umat beragama individu (kelompok) di Indonesia, yakni terkait apakah paham maupun sikap sosial keberamaannya sejalan atau justru bertentangan dengan konstitusi yang diterapkan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan indikator komitmen kebangsaan tersebut sesungguhnya memiliki orientasi agar dapat menyadarkan paham maupun sikap sosial individu

(kelompok) umat beragama di Indonesia untuk dapat mengimplementasikan ajaran agamanya dengan baik tanpa harus bertentangan dengan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik juga (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 43-44).

Dinamika perkembangan dunia teknologi pada kehidupan masyarakat modern pada ranah praksisnya telah berkontribusi besar dalam memberi ruang informasi pada kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga dapat dengan mudah untuk saling mengenal, dan memahami realitas kebudayaan bangsa lain. Namun demikian, hal tersebut juga tidak sedikit dapat berdampak pada ragam hal negatif, seperti trend meniru paham dan kultur asing secara berlebihan, bahkan pada akhirnya dapat mengabaikan budaya sendiri. Kecenderungan paham maupun sikap tersebut yang pada akhirnya dapat menjadikan rasa cinta atau kebanggaan pada kearifan tradisi budaya bangsa sendiri menjadi menurun bahkan dapat hilang. Untuk menyikapi potensi problem tersebutlah, maka sesungguhnya keberadaan nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia termuat seperangkat di dalamnya yang dapat dijadikan sebagai nilai, pendekatan, maupun cara berfikir untuk menanggulangnya (Husaini & Islamy, 2022:67).

Adapun indikator akomodatif terhadap kearifan lokal pada konteks pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia dapat menjadi pendekatan untuk mengidentifikasi sejauh mana paham maupun sikap sosial keberagamaan individu (kelompok) umat beragama di Indonesia dapat bersikap moderat, inklusif, terbuka terhadap fakta keragaman tradisi lokal yang telah tumbuh dan berkembang di berbagai daerah Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaan paham maupun sikap sosial keberagamaan yang moderat pada ranah praksisnya akan dapat menjadikan umat beragama lebih ramah dan terbuka dalam menyikapi fakta keragaman realitas tradisi lokal yang telah tumbuh, hidup dan berjalan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia selama tidak bersebrangan dengan ajaran agamanya (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 46-47).

Jika ditinjau dalam pola interaksi sosial, maka indikator komitmen kebangsaan dan akomodatif terhadap kearifan lokal pada konteks pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan pola interaksi asosiatif berupa akomodasi dalam membangun terwujudnya kehidupan sosial umat beragama yang moderat di Indonesia. Pada konteks indikator komitmen kebangsaan pada ranah praksisnya akan dapat menjadikan individu (kelompok) umat beragama di Indonesia memiliki paham maupun sikap sosial yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak akan mudah terjebak dalam berbagai kepentingan pragmatis dari individu (kelompok), baik dari dalam maupun luar negeri yang mengarah

pada segala bentuk penafian terhadap konsesus ideologi negara dalam menjaga keragaman sosial kehidupan masyarakat Indonesia. Pada konteks inilah, diperlukan paradigma akomodatif dalam memahami dan menyadari pentingnya pengejawantahan paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat dalam menerima pluralisme dasar negara. Terlebih Indonesia sendiri yang notabene masyarakatnya memiliki tingkat multikulturalisme yang tinggi (Hariyanto & Islamy, 2022: 202).

Begitu juga terkait indikator akomodatif terhadap kearifan lokal dalam moderasi beragama juga dapat dikatakan sejalan dengan pola interaksi asosiatif berupa akomodasi. Hal demikian disebabkan manifestasi indikator akomodatif terhadap kearifan lokal dalam pengarusutamaan moderasi beragama akan dapat mengantarkan pada individu (kelompok) umat beragama untuk memiliki paham maupun sikap sosial keberagamaan yang moderat, inklusif, dan terbuka terhadap fakta pluralitas tradisi lokal di Indonesia. Namun penting diketahui sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa paham maupun sikap sosial keberagamaan individu (kelompok) umat beragama yang akomodatif terhadap keragaman tradisi lokal tersebut, yakni dengan catatan selama keberadaan tradisi lokal yang ada tidak bertentangan dengan ajaran agama (M. Siswanto, 2022:4-5).

Dengan ditemukannya keberadaan dimensi pola interaksi asosiatif berupa akomodasi, baik dalam indikator komitmen kebangsaan maupun akomodatif terhadap kearifan lokal sebagaimana telah dipaparkan di atas, menunjukkan pada kita bahwa suksesti pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia menekankan pentingnya implemntasi interaksi sosial yang bersifat asosiatif berupa akomodasi dalam membangun paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang moderat terhadap realitas keragaman ideologi politik kenegaraan dan keragaman tradisi lokal di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Mengacu pada pembahasan utama penelitian ini, maka dapat dikonklusikan bahwa terdapat dimensi pola interaksi sosial yang bersifat asosiatif dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia. Pertama, pola interkasi kerja sama dalam indikator toleransi dan anti radikalisme. Pada konteks ini, dapat ditemukan dari pengarusutamaan moderasi beragama yang menekankan pada pembentukan paham maupun sikap sosial keberagamaan individu (kelompok) umat beragama yang moderat, yakni menghormati, menghargai, dan menerima realitas kemajemukan sosial serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, pola interkasi akomodasi dalam indikator komitmen kebangsaan dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Pada konteks ini, dapat ditemukan dari pengarusutamaan moderasi beragama yang menekankan pada pembentukan paham maupun

sikap sosial keberagamaan individu (kelompok) umat beragama yang moderat dalam menjaga nasionalisme dan tradisi lokal yang baik selama tidak bersebrangan dengan ajaran agama. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pola interaksi asosiatif dalam membangun paham maupun sikap sosial keberagamaan umat yang moderat, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya, maupun bernegara.

### Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan pada temuan sebagaimana telah diuraikan pada sub bab kesimpulan di atas, terdapat keterbatasan penelitian ini yang dapat menjadi rekomendasi penelitian bagi para peneliti lainnya, yakni terdapat ruang kosong objek penelitian untuk dilanjutkan melalui penelitian selanjutnya. Penelitian ini belum mengkaji dimensi nilai-nilai sosial profetik agama-agama dalam indikator moderasi beragama di Indonesia. Hal ini urgen untuk dikaji lebih lanjut. Sebab dengan ditemukan dimensi nilai-nilai sosial profetik tersebut dapat menunjukkan bahwa dimensi pola interaksi sosial asosiatif dalam indikator moderasi beragama di Indonesia memiliki titik temu dengan ajaran universal dari ajaran agama-agama di Indonesia, sehingga dapat menjadi *counter* atas stigma buruk oleh sebgiaan umat beragama di Indonesia yang menganggap bahwa pengarusutamaan moderasi beragama sebagai bentuk liberalisasi atau sekularisasi agama pada konteks kehidupan bermasyarakat, berbudaya, maupun bernegara.

### Daftar Pustaka

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. *Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2):49-50
- Azis, D. K., Saihu, M., Hasibuan, A. R. G., & Islamy, A. (2021). Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(2), 229–244.
- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2): 95
- Hariyanto, D., & Islamy, A. (2022). Pola Interaksi Sosial Kelompok Islam dalam Sejarah Konsesus Dasar Negara Indonesia. *At-Tafkir*, 15(2), 202–217. <https://doi.org/10.32505/at.v15i2.4897>
- Hidayati, Nunung, Siti Maemunah, Athoillah Islamy. (2021). Nilai Moderasi Beragama dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Transformasi :Jurnal Ilmiah dan Pendidikan*, 3(2):10
- Husaini, H., & Islamy, A. (2022). Harmonization of Religion and State : Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7(1), 51–73. <https://doi.org/10.35673/ajhpi.v7i1.2128>

- Islamy, A. (2022a). Moderasi Beragama dalam Ideologi Pancasila. *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18–30.
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Makatita, Ahmad Syarif, Nastasya Aulia Husain, Abdul Aziz Harahap. (2022). “Maintaining Inter-religious Harmony through Acculturation of the Local Tradition in the Dani Muslim Community, Papua,” *Walisongo :Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 30 (1):60.
- Rizkiyah, T., & Istiani, N. (2021). Nilai Pendidikan Sosial Keberagamaan Islam Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2), 86–96. <https://doi.org/10.53491/porosnim.v2i2.127>
- Saihu, M., & Athoillah Islamy.(2022). Mainstreaming Religious Moderation in Male Tradition of The Balinese Muslim Community. *Walisongo :Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*,30 (1):25
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7(2), 198–217. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802>
- Siswanto, M. (2022). Islam Kosmopolitan Gus Dur dalam Konteks Sosial-Keagamaan di Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.2829/JITP.Juni.01>
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI.
- Wahyudin, Ahmad Taufiq, Athoillah Islamy. (2021). Nilai Sosial Keberagamaan Islam dalam Moderasi Beragama di Indonesia. *Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah*, 3 (2): 274
- Yenuri, A. A., Islamy, A., Aziz, M., & Muhandy, R. S. (2021). Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2), 141–156. <https://doi.org/10.53491/porosnim.v2i2.216>
- (2022b). Pendidikan Islam Multikultural dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia. *Analisa Pemikiran Insan Cendekia (APIC)*, 5(1), 48–61.
- (2021c). *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- ., & Ahmad Syarif Makatita. (2022). Religious Moderation in The Bakar Batu Tradition At The Dani Muslim Community in Jayawijaya, Papua Province, Indonesia,”*Khatulistiwa :journal of Islamic Studies*, 12 (1):77.